

Dampak Pandemi Terhadap Kondisi Perekonomian Masyarakat Pedagang Batik Di Wilayah Sapuro

Rahma Sabrina¹, AM. Muh. Khafidz Ma`shum², Achmad Tubagus Surur³
^{1,2,3} UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
e-mail : rahmasabrina@mhs.uinusdur.ac.id¹, ahafidz.ms@uingusdur.ac.id²,
achmad.tubagus.surur@uingusdur.ac.id³

ABSTRAK: Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus korona dan menjadi sebuah wabah pandemi yang mematikan di seluruh dunia. Pemerintah menerapkan kebijakan lockdown untuk menekan laju pertumbuhan penyebaran virus covid-19. Berbagai sektor negara di dunia terkena dari dampak pandemi, terutama sektor perekonomian. Adanya kebijakan dari pemerintah menimbulkan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat seperti penurunan pendapatan, penurunan daya beli konsumsi, dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak pandemi terhadap kondisi perekonomian masyarakat pedagang batik di wilayah Sapuro. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi, penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung di Kelurahan Sapuro, Kota Pekalongan dengan jumlah sampel 5 orang responden yang terdiri dari pedagang batik kelas menengah atas dan bawah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mendapatkan hasil bahwa dampak pandemi terhadap kondisi perekonomian masyarakat Sapuro yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pedagang batik yakni terdapat penurunan pendapatan masyarakat, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, meningkatnya jumlah pengangguran, dan menurunnya daya beli konsumsi masyarakat. Pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat seperti kartu prakerja, bantuan sosial, BLT, dan subsidi kuota. Selama pandemi banyak masyarakat yang bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun sayang bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak merata karena masih terdapat sejumlah masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Dalam pembagian bantuannya, pemerintah harusnya menggunakan data yang akurat, selektif dalam pemilihannya, dan menambah jumlah kapasitas bantuan sehingga masyarakat yang membutuhkan akan terbagi merata mendapatkan bantuannya.

Kata kunci: Covid-19, Perekonomian, Kebijakan Pemerintah, Pedagang Batik.

ABSTRACT: Covid-19 is a disease caused by the corona virus and has become a deadly pandemic outbreak throughout the world. The government has implemented a lockdown policy to suppress the growth rate of the spread of the COVID-19 virus. Various sectors of countries in the world have been affected by the pandemic, especially the economic sector. The existence of policies from the government causes various problems that occur in society such as a decrease in income, a decrease in the purchasing power of consumption, and an increasing number of unemployed in Indonesia. The purpose of this study was to determine the impact of the pandemic on the economic condition of the batik merchant community in the Sapuro area. This research method uses a qualitative method with a phenomenological study approach, this research was conducted by direct interviews in Sapuro Village, Pekalongan City with a sample of 5 respondents consisting of upper and lower middle class batik traders. From the results of interviews conducted by researchers, the results showed that the impact of the pandemic on the economic conditions of the Sapuro community, the majority of which worked as batik traders, namely there was a decrease in people's income, many people lost their jobs, increased unemployment, and decreased purchasing power for public consumption. The government seeks to overcome this problem by providing some assistance to the community such as pre-employment cards, social assistance, BLT, and quota subsidies. During the pandemic, many people depend on the assistance provided by the government to meet the needs of their families, but unfortunately the

assistance provided by the government to the community is uneven because there are still a number of people who have not received this assistance. In the distribution of aid, the government should use accurate data, be selective in its selection, and increase the amount of aid capacity so that people in need will be evenly distributed in getting their assistance.

Keywords: Covid-19, Economy, Government Policy, Batik Merchant.

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 dunia digemparkan adanya penyakit covid-19 yang menjadi wabah pandemi cukup mematikan di seluruh dunia. Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir taun 2019, kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara di wilayah Asia, Australia, Amerika, Eropa, dan Afrika. Penyakit covid-19 disebabkan karena virus corona, virus tersebut biasanya ditemukan pada hewan seperti kelelawar, ular, unta, dan hewan ternak. Virus corona dapat ditularkan kepada manusia apabila berkontak langsung dengan hewan tersebut, namun pada pandemi covid-19 ini penyebaran virus corona dapat ditularkan kepada manusia melalui percikan air liur seperti batuk dan bersin hingga menyebabkan kematian (Buleleng, 2021).

Pembatasan aktivitas dan kehidupan manusia juga telah diterapkan pemerintah (kebijakan *lockdown*) di berbagai negara untuk menekan laju penyebaran covid-19. Virus korona telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia di seluruh dunia, baik dari sektor sosial, kesehatan, budaya, politik, pariwisata, penerbangan terutama di sektor ekonomi yang paling terdampak dari adanya wabah pandemi tersebut (Annur, 2021). Pandemi covid-19 telah memberikan banyak dampak negatif terhadap perekonomian dunia hingga menyebabkan resesi ekonomi (Wikanto, 2020).

Menurut International Moneter Fund (IMF), pandemi covid-19 memberikan dampak kerugian perekonomian dunia dan menyebabkan perekonomian dunia memasuki krisis ekonomi. Menurut World Economic Outlook (WEO), pandemi covid-19 telah menyebabkan perubahan pandangan ekonomi global terjadinya depresi hebat (*great depression*). Bahkan IMF juga menilai bahwa perekonomian dunia pada tahun 2020 diprediksi akan menjadi lebih buruk dari *Great Depression* 1929 dan *Global Financial Crisis* 2008. Dampak lain dari adanya pandemic covid-19 yaitu terjadinya peningkatan pengangguran di berbagai dunia. Peningkatan angka pengangguran yang terus naik akan berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan, kasus bunuh diri, dan meningkatnya kriminalitas di berbagai negara (Arianto, 2020).

Kasus covid-19 di Indonesia pertama kali muncul pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Jokowi bahwa dua WNI telah terjangkit virus corona. Dengan terus meningkatnya penyebaran virus corona di Indonesia, akhirnya pemerintah melakukan pembatasan aktivitas dan kehidupan masyarakat dengan menerapkan kebijakan *lockdown* atau PSBB hingga PPKM di berbagai wilayah Indonesia guna menekan laju penularan covid-19 (Indonesia, 2020). Dengan diterapkannya PSBB dan PPKM di wilayah Indonesia, berbagai aktivitas sosial, politik, kesehatan, sekolah, budaya, dan ekonomi diwajibkan untuk menerapkan sejumlah protokol kesehatan (Retaduari, 2022).

Kebijakan PSBB dan PPKM dilaksanakan dengan cara membatasi aktivitas pergerakan masyarakat di wilayah Indonesia (*social distancing* dan *physical distancing*). Berbagai aktivitas yang terjadi dan yang sudah terjadwal terpaksa harus ditunda bahkan dibatalkan untuk menghindari penyebaran virus korona. Aktivitas yang melakukan tatap muka dan kontak fisik seperti kegiatan sekolah, perjalanan, acara pesta, dan pekerjaan kantoran juga terpaksa harus dihentikan dikarenakan

takut menyebarkan virus korona. Hal itu memberikan dampak perubahan besar pada kehidupan sosial dan perekonomian negara (Purwanto et al., 2020).

Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah tersebut guna menekan laju penyebaran virus korona dengan cara melakukan kampanye massal untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M). Cara tersebut diterapkan pada aktivitas kegiatan masyarakat seperti kegiatan pembelajaran sekolah yang dilakukan dengan cara belajar dari rumah atau online, pekerja kantoran melakukan pekerjaannya dengan *work from home*, kegiatan belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga diganti dengan cara *shopping online*, dan lain sebagainya (Tyasara, 2021). Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan masyarakat dari paparan penyebaran virus korona tanpa mengurangi aktivitas masyarakat dan menanggulangi pemulihan perekonomian negara. Tidak hanya itu saja pemerintah juga melakukan kebijakan lain yaitu dengan memberikan dana bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak bisa bekerja dan kurang mampu karena adanya kebijakan PSBB dan PPKM (Gitiyarko, 2020).

Namun disisi lain kebijakan yang telah dilakukan pemerintah tidak berjalan dengan baik dan menimbulkan berbagai masalah yang ada. Misalnya di sektor pendidikan baik di sekolah maupun perkuliahan menerapkan kebijakan belajar dari rumah dengan sistem pembelajaran online banyak siswa dan mahasiswa yang kesulitan menjalaninya mulai dari susah sinyal, harga kuota yang mahal, gagap teknologi (gaptex), kesusahan memahami materi pembelajaran, dan lainnya. Meskipun Pemerintah telah berupaya menangani pandemi covid-19 dengan memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun selama adanya kebijakan PSBB dan PPKM masih banyak masyarakat yang kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya karena pembagian dana bantuan sosial yang tidak merata. Adanya pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat hingga berdampak pada pemutusan dan penutupan usaha kerja yang menimbulkan permasalahan sosial yakni banyak perusahaan yang melakukan PHK karena kerugian yang dialaminya (Nuryana, 2020).

Pandemi covid-19 telah melemahkan segala aktivitas kegiatan masyarakat di sektor perekonomian terutama pada sektor pariwisata. Pada dasarnya sektor pariwisata termasuk salah satu penunjang yang memiliki peranan penting dalam sektor perekonomian suatu negara. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum pandemi covid-19 memasuki Indonesia jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan. Namun setelah pandemi masuk ke wilayah Indonesia kunjungan para wisatawan mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan mengurangi pengunjung bahkan menutup paksa area penerbangan untuk menghindari kerumunan dan menekan laju peningkatan covid-19. Hal itu memberikan pengaruh besar di kehidupan masyarakat misalnya banyak perusahaan, pabrik, toko, dan UMKM menutup usahanya karena adanya pandemi tersebut (Fahelfi, 2020).

Selama pandemi, perekonomian Indonesia dinilai mengalami penurunan ekonomi yang signifikan. Pada tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami depresiasi sebesar 2,07% dan sektor yang paling terdampak yakni sektor akomodasi dan panganan (Panjaitan, 2022). Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan PDB Indonesia bahkan belum mengalami pertumbuhan yang positif sejak triwulan ke-1 di tahun 2020 dan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2021 mengalami peningkatan sebanyak 1,82 juta orang dibandingkan pada bulan Februari tahun 2020. Hal ini disebabkan karena banyaknya sektor yang terpaksa menutup usahanya saat pandemi. Maka dari itu, untuk memulihkan perekonomian Indonesia kembali berjalan normal, kerjasama antar ekonomi adalah

hal yang sangat dibutuhkan karena dipercaya dapat meningkatkan perekonomian di masa pandemi (Kezia, 2021).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberitahukan faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi domestik pada kisaran 4,7% sampai dengan 5,5% pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi lebih tinggi dari tahun 2021 yang berada di rentang 3,2% sampai dengan 4% sejalan dengan tendensi pemulihan ekonomi nasional dan dunia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan bahwa realisasi investasi Januari-Desember tahun 2021 mencapai sekitar Rp236,7 triliun atau naik 17,3% disbanding realisasi investasi Januari-Desember tahun 2020 sebesar Rp201,87 triliun (Sakti, 2021).

Sapuro merupakan salah satu tempat wisata ziarah yang ada di Kota Pekalongan. Mayoritas masyarakatnya adalah pedagang batik. Di wilayah Sapuro juga terkena dampak pandemi karena adanya kebijakan dari pemerintah banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan pekerjaannya seperti biasa. Mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang perdagangan batik, dimana target pasarnya sendiri adalah masyarakat dari luar kota yang melakukan wisata ziarah di daerah Sapuro. Dengan diterapkannya PSBB dan PPKM banyak masyarakat di berbagai wilayah Indonesia tidak bisa melakukan perjalanan ke luar kota, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produksi dan daya beli masyarakat serta menghambat perekonomian masyarakat Sapuro.

Selama masa pandemi, banyak masyarakat Sapuro yang kehilangan pekerjaan utama dan kesusahan mencari pekerjaan lain sebagai sampingannya guna mencukupi ekonomi keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan sisa tabungan yang ada, melakukan penghematan sekeras mungkin, dan mengandalkan bantuan yang ada dari pemerintah karena pekerjaan utamanya yang tidak bisa terlaksana dengan baik bahkan bisa dikatakan juga mereka kehilangan pekerjaan utamanya serta susah mereka mencari pekerjaan sampingan. Bantuan dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan paket sembako pun tidak terbagi dengan merata, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan cairan dana bantuan dan paket sembako dari pemerintah (Fahelfi, 2020).

Selain pemberlakuan kebijakan PSBB, PPKM, dan kampanye massal (3M) untuk menanggulangi masalah yang terjadi pemerintah juga menerapkan sistem kebijakan lain yakni dengan pengadaan vaksinasi nasional. Vaksinasi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu vaksin dosis satu, dua, dan tiga (*booster*) (Kompas, 2022). Masyarakat diwajibkan untuk melakukan vaksin guna memperkuat imun tubuh, merangsang sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi terjadinya resiko penularan virus korona (KEMENKES, 2021).

Selama lebih dari satu tahun pandemi mulai mereda, kebijakan PSBB dan PPKM dicabut kemudian digantikan dengan masa *newnormal*. Pada saat masa *newnormal*, aktivitas masyarakat sedikit demi sedikit mulai berjalan dengan normal. Masyarakat yang kehilangan pekerjaannya mulai mendapatkan pekerjaan pengganti, sekolah-sekolah maupun perkuliahan yang dilaksanakan secara online sedikit demi sedikit mulai melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), pariwisata yang tadinya selama pandemi ditutup secara total mulai dibuka kembali. Namun semua itu dilakukan tetap menggunakan protokol kesehatan dan juga melakukan vaksin minimal satu kali.

Penelitian berjudul *Dampak Pandemi Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Wilayah Sapuro* dilakukan untuk menganalisa masalah yang terjadi tentang bagaimana perekonomian masyarakat Sapuro selama pandemi Covid-19, yang mana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pedagang batik. Adapun beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya yaitu penelitian milik Rizal Fahlefi (2020) dengan judul *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap*

Perekonomian Masyarakat Di Sektor Informal yang membahas tentang perekonomian masyarakat Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat di sektor informal khususnya subsektor transportasi karena adanya pandemi covid-19. Kemudian penelitian yang dilakukan Livana PH, dkk (2020) yang berjudul *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa* membahas tentang hasil observasi dari dampak pandemi bagi masyarakat di Desa Triharjo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya itu saja, penelitian yang dilakukan Dedi Junaedi, dkk (2021) berjudul *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Bogor* membahas tentang dampak pandemi terhadap tingkat pendapatan masyarakat bogor dan menganalisa perilaku belanja dan pengeluaran masyarakat Bogor karena adanya pandemi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui semua informasi pada penelitian yang dilakukan, artikel ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi fenomenologi. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara secara langsung di lapangan yang mencakup para pedagang batik yang ada di wilayah Sapuro dengan jumlah sampel terdiri dari 5 orang responden. Kemudian data hasil wawancara dari penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Sapuro (Makam Habib Ahmad Bin Abdullah Bin Tholib Al-Athas) Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan salah kota yang religius di wilayah Jawa Tengah. Terdapat makam para ulama di wilayah tersebut salah satunya seorang ulama besar Habib Ahmad Bin Abdullah Bin Tholib Al-Athas tepatnya berada di kelurahan Sapuro, Kota Pekalongan. Makam Habib Ahmad Bin Abdullah Bin Tholib Al-Athas berada didalam bangunan yang berbentuk segi empat beratap limasan dan merupakan salah satu tempat wisata yang ramai dan paling sering dikunjungi oleh para peziarah didalam maupun luar daerah (Aroengbinang, 2019).

Habib Ahmad Bin Abdullah Bin Thalib Alathas merupakan salah satu tokoh ulama Indonesia yang lahir di kota Hajren Hadramaut, Yaman pada tahun 1255 Hijriyah atau 1836 Masehi. Beliau menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu agama di kota asalnya. Beragam disiplin ilmu agama berhasil diraihinya dengan gemilang. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke kota Mekah dan Madinah. Mendapat tempaan ilmu oleh berbagai guru dikedua kota suci tersebut, menurut beliau guru yang paling besar pengaruhnya adalah Habib Ahmad adalah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau merupakan seorang ulama yang memiliki banyak murid di Mekah dan di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Tokoh ulama Indonesia yang pernah berguru kepada beliau adalah Hadhratul Fadhil Mbah K.H. Kholil, Bangkalan Madura dan Hadrotusy Syekh K.H. Hasyim Asy'ari, Jombang Jawa Timur. Kedua ulama tersebut merupakan cikal bakal adanya jamiyyah Nahdhatul Ulama (Anas & Adinugraha, 2017).

Setelah selesai menempuh pendidikan dan latihan kerohanian secara mendalam, Habib Ahmad mendapat tugas dari gurunya untuk berdakwah menyebarkan syariat agama Islam di kota Mekah. Beliau sangat dicintai dan dihormati oleh segala lapisan masyarakat, karena Habib Ahmad berusaha meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Habib Ahmad mengajar dan berdakwah di kota Mekah selama tujuh tahun. Setelah itu beliau kembali ke kampung halamannya, Hadramaut. Tak lama dari itu, Habib Ahmad merasa terpanggil untuk berdakwah di wilayah Asia Tenggara dan pilihan beliau jatuh ke Indonesia (Riyadi & Adinugraha, 2021). Karena memang pada waktu itu sedang

ramainya para imigran Hadramaut yang berdatangan ke Indonesia. Di samping untuk berdagang juga untuk mensyiarkan ajaran Islam (Faiza et al., 2022).

Pada zaman dulu, Habib Ahmad ibarat Khalifah Umar bin Khathab yang sangat tegas dan keras menentang setiap kemungkaran. Tidak berbuat mungkar itu pejabat maupun orang awam. Menjelang akhir hayatnya, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athas mengalami patah tulang pada pangkal pahanya, akibat jatuh hingga beliau tidak sanggup berjalan. Sejak saat itu beliau mengalihkan semua kegiatan keagamaan di kediamannya, termasuk salat berjamaah dan pengajian. Penderitaan ini berlanjut sampai beliau dipanggil pulang ke Rahmatullah. Habib Ahmad Bin Abdullah Bin Thalib Al-Athas meninggal dunia pada malam ahad 24 rajab 1347H atau tahun 1928M . Habib Ahmad meninggal dunia dalam usia 92 tahun. Walaupun beliau meninggal dunia pada tanggal 24 Rajab, akan tetapi acara khaulnya diperingati setiap tanggal 14 Syakban, bertepatan dengan malam nisfu Syakban. Masyarakat dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri ikut hadir pada acara Khaul tersebut. Setiap harinya juga banyak rombongan peziarah dari berbagai kota yang menyempatkan waktunya untuk berdoa di Makam Habib Ahmad, sehingga saat ini kawasan Sapuro sudah dikenal sebagai tujuan wisata ziarah, khususnya ziarah Walisongo (Aryanta, 2016).

3.2 Kondisi Perekonomian Masyarakat Sapuro Dan Peranan Pemerintah

Pandemi pada tahun 2020 memberikan dampak perubahan besar disejumlah negara dunia di wilayah Asia, Australia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Berbagai sektor terkena dampak dari adanya pandemi seperti sektor ekonomi, sosial, kesehatan, budaya, politik, maupun pariwisata. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus korona dengan menerapkan kebijakan PSBB dan PPKM (*social distancing* dan *physical distancing*) (Junaedi & Salistia, 2020).

Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%, dari 3,2-4,0% pada tahun 2021, adanya kelanjutan perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dan membangun perekonomian Indonesia dari krisis ekonomi (Haryono, 2021).

Prediksi pertumbuhan ekonomi RI dan global pada tahun 2022 telah dirilis oleh sejumlah lembaga internasional dan juga lembaga Bank Indonesia (BI). *International Monetary Fund* (IMF) memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai angka 5,9%. Untuk melawan pandemi covid-19 dan membangkitkan ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan menegaskan bahwa anggaran dikelola secara fleksibel. Namun, pemerintah juga memastikan untuk pengelolaan anggaran harus selalu dijaga. Tata kelola yang baik dalam membangun *good governance* menjadi ketentuan sendiri yang tidak boleh dikesampingkan dalam pelaksanaan anggaran (Sakti, 2021).

Gabungan kebijakan BI pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian (Adinugraha & Yuliantika, 2021).

Gabungan kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan, yaitu :

- 1) Kebijakan moneter

Sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs), kebijakan moneter BI pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional (Hermawan Adinugraha et al., 2022).

2) Kebijakan makroprudensial

Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau.

3) Kebijakan sistem pembayaran

Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, antara lain melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI FAST), termasuk perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerja sama QRIS antarnegara, dan melanjutkan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata.

4) Kebijakan pengembangan pasar uang

Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

5) Kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah

Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor (Haryono, 2021).

Adapun dampak nyata dari krisis ekonomi akibat pandemi terhadap sektor UMKM yang selama ini menopang perekonomian Indonesia yaitu :

a) Adanya Penurunan Penjualan

Berdasarkan survei LIPI, setidaknya 94,69% UMKM mengalami penurunan penjualan produk dan akhirnya menyebabkan profit yang menurun secara signifikan, yang mana biaya produksinya cenderung tetap bahkan meningkat.

b) Pasokan Bahan Baku yang Terbatas

Beberapa UMKM bergantung pada bahan baku impor maupun lintas daerah di Indonesia. Akan tetapi kebijakan PSBB di berbagai wilayah dalam negeri maupun *lockdown* di sejumlah negara di dunia menyebabkan bahan baku menjadi sulit diperoleh seperti biasanya.

c) PHK Karyawan

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan akibat virus korona tembus mencapai angka 30,6 juta orang pada Mei 2020. Akan tetapi BAPPENAS memprediksi tingkat pengangguran terbuka akan meningkat 4 juta hingga 5,5 juta di tahun 2020, sehingga sampai tahun 2021 pengangguran di Indonesia bisa mencapai 10,7-12,7 juta.

d) Kesulitan Dalam Membayar Pinjaman

UMKM selama ini mampu berkembang dengan fasilitas kredit yang ringan dari sektor perbankan. Namun situasi pandemi, membuat UMKM sulit untuk

mengatasinya (Pangestuti et al., 2022). Maka dari itu, pemerintah melalui Peraturan OJK nomor 11 tahun 2020 melakukan upaya restrukturisasi kredit oleh Lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Pada 6 Juli 2020, OJK mencatat realisasi restrukturisasi kredit mencapai Rp769,55 triliun kepada 6,72 juta debitur (Misbakhun, 2020).

Adanya kebijakan untuk melakukan program *stay at home* dan *social distancing* menyebabkan masyarakat tidak bisa dengan bebas melakukan segala aktivitas yang dilakukan di luar rumah salah satunya bekerja. Sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan para pekerja diberbagai sektor dan menimbulkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehariannya dan menimbulkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia (Dwina, 2020). Pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat guna keberlangsungan hidup sekaligus meringankan beban yang dialami masyarakat selama masa pandemi. Bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yakni berupa program kartu prakerja, dana bantuan sosial, BPUM atau BLT UMKM, dan subsidi kuota internet (Widya, 2021).

Dampak perubahan yang terjadi karena adanya pandemi terhadap perekonomian masyarakat Sapuro yaitu menurunnya pendapatan masyarakat, kehilangan pekerjaan, dan menurunnya daya beli konsumsi masyarakat. Dengan diterapkannya kebijakan dari pemerintah (PSBB dan PPKM) membuat masyarakat tidak bisa keluar rumah dan bepergian. Hal ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat pada sepi penjualan batik milik masyarakat Sapuro.

Untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat Sapuro selama pandemi, maka peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah masyarakat setempat (5 orang responden). Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti mendapatkan hasilnya sebagai berikut :

1. Responden 1 bernama Amirul usia 29 tahun seorang kepala keluarga yang memiliki seorang istri dan anak, pekerjaan (utama) sehari-harinya sebagai pedagang batik. Selama pandemi dagangannya sepi tidak ada pembeli dikarenakan adanya PSBB dan PPKM berakibat pada peziarah yang tidak bisa melakukan perjalanan keluar daerah. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, beliau mencari pekerjaan lain (serabutan) dan membantu istri jualan masakan demi adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Bantuan dari pemerintah berupa bantuan sosial dan BLT diterimanya, menurutnya bantuan tersebut hanya mampu mencukupi kebutuhan keluarganya selama pandemi namun tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
2. Responden 2 bernama Bachtyar usia 34 tahun seorang kepala keluarga yang memiliki seorang istri dan dua orang anak, bekerja sebagai pedagang batik dan istrinya mantan pekerja pabrik yang dirumahkan. Tetap bertahan menjadi pedagang batik karena susah mencari pekerjaan sampingan lainnya. Pandemi membuat dagangannya sepi pembeli dan akhirnya berdampak pada kurangnya pemenuhan kebutuhan keluarganya. Penghasilan terakhir istri dijadikan untuk membuka warung usaha masakan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
3. Responden 3 bernama Kholik seorang kepala keluarga yang berusia 55 tahun memiliki seorang istri dan empat orang anak, bekerja sebagai pedagang batik. Bisa dikatakan bahwa bapak Kholik ini satu-satunya responden yang tetap santai dan melakukan semua hal dengan apa adanya. Hal yang dilakukannya untuk mengatasi masalah yang terjadi saat pandemi dengan melakukan pengiritan dan hidup hemat, juga dengan mencari pekerjaan lain (serabutan) dilakukan untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga selama masa pandemi. Dan bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak

- akan pernah menyelesaikan masalah yang terjadi dan menurutnya bantuan dari pemerintah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
4. Responden 4 bernama Zaki berusia 32 tahun seorang kepala keluarga yang memiliki seorang istri dan anak, bekerja sebagai pedagang batik. Meskipun pandemi telah menyerang seluruh aktivitas masyarakat, beliau tetap bertahan dengan pekerjaannya sebagai pedagang batik. Hidup hemat dan serba pengiritan merupakan hal utama dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Menurutnya pembagian bantuan dari pemerintah masih belum merata, karena keluarganya tidak mendapatkan bantuan sepeserpun. Padahal di masa pandemi yang mana minimnya hasil pendapatan tentunya bantuan dari pemerintah akan sangat membantu ekonomi keluarga.
 5. Responden 5 bernama Randi berusia 56 tahun seorang kepala keluarga yang menghidupi 5 orang anak, bekerja sehari-hari sebagai pedagang batik. Pensiunan PNS membuatnya tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selama pandemi keluarganya tidak mendapatkan sedikitpun bantuan dari pemerintah, hanya mengandalkan uang tabungan dan pensiunan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, juga tetap bertahan pada pekerjaannya sebagai pedagang batik karena susah mencari pekerjaan lain. Menurutnya bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat tidak berpengaruh dalam kehidupannya.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Sapuro yang mayoritas masyarakatnya berjualan batik, pendapatannya menurun akibat adanya penurunan daya beli konsumsi masyarakat dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah (PSBB dan PPKM). Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan program kartu prakerja, bantuan sosial, BLT, dan subsidi kuota. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan minimnya pendapatan yang diperoleh selama pandemi, tentunya masyarakat akan sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah. Namun sayang pembagian bantuan dari pemerintah tidak merata, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut padahal masyarakat sangat membutuhkannya (Marom et al., 2021).

Saran atas pembagian bantuan yang belum merata, hendaknya pemerintah ataupun petugas yang bekerja melakukan survei langsung di lapangan melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat tidak hanya mengandalkan RT/RW setempat untuk mendapatkan datanya. Pemerintah harusnya lebih merata, akurat, dan selektif lagi dalam mendata karena masih banyak masyarakat kalangan menengah atas yang masih belum mendapatkan bantuannya padahal mereka juga sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk menunjang kebutuhan keluarganya selama pandemi (Maknolia & Hidayat, 2020).

4. KESIMPULAN

Awal pandemi pertumbuhan ekonomi cenderung terdepresiasi karena daya beli masyarakat menurun akibat dampak dari naiknya jumlah tingkat pengangguran. Adanya kebijakan untuk melakukan program *stay at home* dan *social distancing* menyebabkan masyarakat tidak bisa dengan bebas melakukan segala aktivitas yang dilakukan di luar rumah salah satunya bekerja. Sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan para pekerja diberbagai sektor dan menimbulkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehariannya dan menimbulkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Kebijakan BI pada tahun 2022 (kebijakan ekonomi nasional) untuk mempercepat pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian yaitu kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pengembangan pasar uang, dan kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah.

Pemerintah harus mendorong program-program yang dapat membangkitkan UMKM. Pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat guna keberlangsungan hidup sekaligus meringankan beban yang dialami masyarakat selama masa pandemi. Bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yakni berupa program kartu prakerja, dana bantuan sosial, BPUM atau BLT UMKM, dan subsidi kuota internet. Dampak perubahan yang terjadi karena adanya pandemi terhadap perekonomian masyarakat Sapuro yaitu menurunnya pendapatan masyarakat, kehilangan pekerjaan, dan menurunnya daya beli konsumsi masyarakat. Dengan diterapkannya kebijakan dari pemerintah (PSBB dan PPKM) membuat masyarakat tidak bisa keluar rumah dan bepergian. Hal ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat pada sepi nya penjualan batik milik masyarakat Sapuro.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Yuliantika, N. (2021). Strategi Marketing Usaha Pemancingan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kalijambe Kidul, Sragi, Pekalongan. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2385>
- Anas, A., & Adinugraha, H. H. (2017). Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 53–72. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356>
- Annur, C. M. (2021). *Penghasilan Berkurang, Dampak Pandemi Covid-19 Yang Paling Dirasakan Masyarakat*. Databoks.
- Arianto, B. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 2, 108–109.
- Aroengbinang, B. (2019). *Makam Habib Ahmad Sapuro Pekalongan*. Aroengbinang.Com.
- Aryanta. (2016). *Kawasan Wisata Religi Sapuro Dan Khaul Habib Ahmad Bin Abdullah Bin Tholib Al-Athas*. Badan Promosi Pariwisata Kota Pekalongan (BP2KP).
- Buleleng, A. (2021). *Penyebab, Gejala, dan Pencegahan Virus Corona*. Dinkes.Bulelengkab.Go.Id.
- Dwina, I. (2020). *Melemahnya Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Sektor Pariwisata, Akibat Dampak Dari Pandemi Covid-19*.
- Fahelfi, R. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Sektor Informal*.
- Faiza, I., Nurani, L., Permatasari, I., Hermawan, H., & Adinugraha. (2022). Fitur Halal Shopee Barokah Sebagai Preferensi Belanja Online Muslim Di Era Digital. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 1(1).
- Gitiyarko, V. (2020). *Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19*. Kompas Pedia.
- Haryono, E. (2021). *BI PROYEKSIKAN PERTUMBUHAN EKONOMI 4,7-5,5% TAHUN 2022*.
- Hermawan Adinugraha, H., Thoha, I. B., Widodo, H. K., Hamdi, M., & Nasarruddin, R. Bin. (2022). Learning Financial Literacy Through Savings Activities in Islamic Elementary Schools: Empirical Evidence at Islamic Elementary School. *Journal of Elementary Educational Research*, 2(2). <https://doi.org/10.30984/jeer.v2i2.317>
- Indonesia, C. (2020). *Lika-Liku Istilah Jokowi : Dari PSBB Hingga Mini Lockdown*. CNN Indonesia.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA 2020*.
- KEMENKES, U. (2021). *4 Manfaat Vaksin Covid-19 Yang Wajib Diketahui*. Upk.Kemkes.Go.Id.
- Kezia. (2021). *Lifeatunpar Kelas MIHI*. Twitter.

- Kompas. (2022). *Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19*. Kompas Pedia.
- Maknolia, Y., & Hidayat, D. (2020). Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 Di Kota Bandung. *MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3, 5–6.
- Marom, K., Tamamudin, T., & Adinugraha, H. H. (2021). Hope Family Program for Muslim Society Welfare: Evidance From Hope Family West Pekalongan Regency. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(1), 54–69. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1137>
- Misbakhun. (2020). *4 Dampak Nyata Dari Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor UMKM*. Twitter.
- Nuryana, A. N. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*. Kantor Kemenag, Jabar.
- Pangestuti, N. K., Mufarih, M. A. F., Nisa, A. F., & Adinugraha, H. H. (2022). Pendampingan Pemasaran Produk Melalui Sistem Digitalisasi Bagi UMKM Mie Ayam Di Desa Gejlig, Kabupaten Pekalongan. *Jdistira*, 2(1).
- Panjaitan, J. I. R. (2022). *Latar Belakang Pemilihan SDG 8*. Twitter.
- Purwanto, H., Fauzi, M., Wijayanti, R., Al Awwaly, K. U., Jayanto, I., Mahyuddin, Purwanto, A., Fahlevi, M., Adinugraha, H. H., Syamsudin, R. A., Pratama, A., Ariyanto, N., Sunarsi, D., Hartuti, E. T. K., & Jasmani. (2020). Developing model of halal food purchase intention among indonesian non-muslim consumers: An explanatory sequential mixed methods research. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(10), 396–407. <https://doi.org/10.31838/srp.2020.10.63>
- Retaduari, E. A. (2022). *2 Maret 2020, Saat Indonesia Pertama Kali Dilanda Covid-19*. Kompas.Com.
- Riyadi, A., & Adinugraha, H. H. (2021). The Islamic Counseling Construction in Da'wah Science Structure. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 11–38. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.6543>
- Sakti, P. (2021). *Tahun 2022 Hilangnya Pandemi dan Pulihnya Ekonomi*. Twitter.
- Tyasara, L. (2021). *5 Upaya Pemerintah Mengatasi Pandemi Covid-19 Selain PPKM Level 4 Diperpanjang*. Liputan 6.
- Widya, A. (2021). *5 Macam Bantuan Dana Yang Diberikan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19*. Parapuan.
- Wikanto, A. (2020). *Daftar 10 Negara Masuk Jurang Resesi Ekonomi Akibat Pandemi Corona*. Kompas.Com.